BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Jhingan (2004), negara terbelakang atau berkembang adalah negara yang di cirikan dengan kemiskinan seperti tercermin pendapatan perkapita rendah. Berdasarkan pendapatan Jhingan tersebut, di ketahui bahwa pada umumnya di negrara berkembang masalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi, kedua hal tersebut selalu di nyatakan bersama sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan.

Di Indonesia, dalam menentukan jumlah orang miskin, BPS menggunkan batas atau garis miskin dari besarnya rupiah yang di belanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum kanan dan bukan makanan. untuk kebutuhan makanan dinpakai patokan 2100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Komponen pengeluaran bukan makanan ini di bedakan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Hingga saat ini sudah ada sejumlah studi empiris yang hasilnya dapat memberikan suatu gambaran mengenai variasi dalam tingkat kemiskinan antar sektor Indonesia. Di

antaranya adalah dari Hasibuan (1995), yang hasil perhitungannya menunjukan bahwa berdasarkan nilai koefisien Gini ketimpangan pendapatan dari sektor pertanian bukan yang terburuk dibandingkan di banyak sektor lainnya. Perbedaan upah atau gaji per bulan (bruto maupun neto) per sektor menunjukan bahwa tingkat pendapatan di sektor pertanian adalah yang terendah. Berdasarkan kombinasi antara upah yang terendah dan nilai Gini yang cukup tinggi (walaupun bukan yang tertinggi), dapat dikatakan bahwa jumlah orang miskin paling banyak terdapat di sektor pertanian.

Perbincangan maupun pembahasan yang relatif jarang sekali itu rupanya bukan hanya terjadi di Kalimantan Selatan saja, tetapi juga merupakan fenomena dihampir keseluruhan provinsi di Indonesia sebagaimana yang dikatakan oleh Prijono Tjiptoherijanto, "Masalah kemiskinan dan pemrataan pendapatan masih merupakan topik yang hangat untuk dibicarakan; terutama kalau mengingat pada besarnya pengangguran yang kronis disebabkan masih adanya pekerjaan di bawah produktivitas (*underemployment*) serta rendahnya kualitas tenaga kerja kita. Sementara diduga adanya hubungan yang positif antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan".

Pada Kota Banjarmasin sendiri, ketika menelusuri jalan-jalan kota, relatif tidak mungkin pandangan mata tidak melihat keberadaan orang miskin. Mulai dari pengamen anak-anak, pemungut sampah, penjual bensin pada sisi jalan, penjaga parkir, penjual koran pada peremparan

jalan, belum lagi yang sering ditemui di pasar-pasar tradisional seperti penjual sayur, penjual ikan kering, dan masih banyak lagi jika perlu untuk disebutkan satu-persatu. Tetapi hanya sedikit atau sama sekali tidak ada yang menjelaskan penyebab-penyebab ini, sebagian besar tidak berdasarkan sejarah, dan hampir sama sekali tanpa informasi ekonomi.

Data statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan mengenai tingkat kemiskinan menyatat, jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 184.297 orang atau sebesar 4,76 % dari 3.854.485 jumlah penduduk Kalimantan Selatan. Masih terdapat ratus ribuan penduduk Kalimantan Selatan yang miskin.

N. Gregory Mankiw menyatakan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Secara umum, orang-orang miskin itu biasanya lebih rentan terhadap berbagai penyakit sosial, mulai dari gaya hidup menggelandang yang kurang manusiawi, ketergantungan obat bius, kekerasan rumah tangga, masalah-masalah kesehatan, kehamilan remaja di luar nikah, buta huruf, pengangguran, dan prestasi pendidikan yang rendah. Anggota keluarga miskin biasanya memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan tindakan keriminal, dan mereka juga lebih rapuh sehingga lebih mudah untuk menjadi korban kriminalitas. Meskipun sulit untuk memisahkan rangkaian sebab dan akibat kemiskinan, tidak bisa dibantah bahwa kemiskinan senantiasa terkait erat dengan berbagai penyakit ekonomi dan sosial.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan acuan garis kemiskinan, yaitu konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau *basic needs approach*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Maka garis kemiskinan atau batas kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi. BPS Kalimantan Selatan menyatat pada tahun 2013, garis kemiskinan memiliki rata-rata pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp. 300.329 per bulan, meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 269.714 per bulan. Maka pendapatan per kapita per bulan jika tidak mencapai garis kemiskinan, maka masuk dalam kategori miskin. Berikut ini merupakan tabel dari jumlah penduduk di Provinsi Kaliman Selatan.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2010	181963
2011	194623
2012	190597
2013	184297
2014	182876

Sumber : BPS Kalsel Tahun 2014

Dilihat dari tabel di atas jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan selatan meningkat pada tahun 2010 ke 2011 dengan jumlah 12260 jiwa. Sedangkan dari tahun 2011 sampai 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan walaupun sedikit setiap tahunnya. Hal dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan menurun dengan baik, dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami peningkatan juga.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional (daerah). Menurut Todaro (dalam Yunitasari, 2007) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam kisaran angka 4% - 6,5% selama kurun waktu antara tahun 2000–2011.

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang dan jasa kepada penduduk (Yunitasari, 2007). Menurut Todaro (2003) berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut diwujudkan dalam 3 komponen utama. Pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal manusia atau sumberdaya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang selanjutnya akan menambah jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi yang dalam pengertian sederhananya terjadi karena ditemukannya cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani suatu pekerjaan (dalam Pambudi, 2013).

Salah satu peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yakni meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan suatu indikator pertumbuhan ekonomi. PDRB juga merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, PDRB dapat mengurangi angka kemiskinan.

Investasi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Pertumbuhan investasi dapat mengembangkan produksi barang-barang dan jasajasa yang sangat bernilai dari produksi barang-barang dan

jasa-jasa sebelumnya. Peningkatan investasi juga dapat mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan keria, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat, akan mengurangi jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Peningkatan investasi sangat penting bagi provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan yang kaya raya sumber daya alam, membutuhkan modal untuk mengelola sumber daya tersebut. Sumber daya alam yang memberikan kontribusi pada perekonomian Kalimantan Selatan seperti: perkebunan, pertanian, pariwisata, perikanan, pertambangan, dan sektor-sektor lainnya yang perlu ditingkatkan melalui peningkatan investasi.

Selain itu, jumlah angkatan kerja terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk maka angkatan kerja menjadi semakin besar. Hal itu dapat menjadi beban tersendiri bagi perekonomian. Meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan akan menyebabkan masalah pengangguran. Orang-orang yang menganggur ini secara automatis tidak akan memperoleh penghasilan. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan pun mereka tidak bisa. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesejahteraannya menurun. Hal tersebut berlawanan dengan harapan pemerintah, yaitu semakin banyaknya jumlah angkatan kerja diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian. Jika

meningkatnya jumlah penduduk angkatan kerja tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja.

Indeks Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk (Andaiyani, 2012). Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas non fisik melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ternyata semakin membaik selama dua dekade terkahir, meskipun laju perbaikannya relatif tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga.

Berbeda dengan anggapan umum selama ini, ketimpangan pembangunan manusia (IPM) di Indonesia ternyata cenderung semakin mengecil. Pada tahun 2011, IPM kawasan Sumatera, Jawa dan Bali pada umumnya berada di atas rata-rata nasional (72,77). Sedangkan IPM kawasan di luar Jawa, Sumatera dan Bali (Indonesia Tengah dan Timur) pada umumnya di bawah rata-rata nasional, kecuali Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Sementara itu, daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua juga telah mengalami kemajuan tingkat IPM yang lebih pesat dibanding daerah lainnya.

Tabel 1.2

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun	IPM
2010	65.2
2011	65.89
2012	66.68
2013	67.17
2014	67.63

Indeks Pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan Sendiri mengalam peningkatan dari tahun ke tahunnya. Walaupun mengalaiman peningkatan relatif kecil tetapi pada tahun 2014 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kaliman Selatan adalah 67,63%. Dilihat dari ini Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan sangatlah baik.

Dengan ini Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang banyak memilik potensi sumber daya alam yang melimpah. Seharusnya pemerintah dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Provinsi Kaliman Selatan. Dengan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, Penanaman Modal Dalam Negeri serrta menciptakan lowongan kerja untuk Jumlah Angkatan Kerja terus meni8ngkat, dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan yang baik. Sehingga penulis mengambil judul penelitian: **"Analisis Pengaruh PDRB, PMDN, Jumlah Angkatan Kerja, dan IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan".**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagi berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan?
4. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan?

1.3 Tujuan Penelituan

1. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Menganalisis pengaruh Jumlah Angkatan Kerja terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Pengambil Kebijakan

   Untuk pengambil kebijakan penelitian ini diharapkan apat memberikan informasi mengenai variabel terkait yang mempengaruhi ketimpangan suatu wilayah sehingga dapat lebih jauh mengambil kebijakan selanjutnya dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kalimantan Selatan pada khususnya.

2. Ilmu Pengetahuan

   Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah Ilmu pengetahuan dan dapat melengkapi kajian ketimpangan wilayah dengan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhinya dan sebagai acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan masalah ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang unsure-unsur penelitian yang memuat penelitian-penelitian terlebih dahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Bab ini juga beriisi teori-teori yang mendasari dilakukannya penelitian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan hipotesis mengenai penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang jenis dan sumber data, menjelaskan tentang variabel-variabel yang digunakan agar bisa mengoperasionalkan di dalam penelitian dan membahas metode analisis yang digunakan dalam peenlitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai data penelitian , menyajikan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis data. Bab ini juga membahas semua temuan-temuan dari hasil penelitian analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dari analisis yang dilakukan pada bagian bab sebelumnya. Simpulan ini juga harus telah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumuasan masalah dan implikasi sebagai hasil dari simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga pada bab ini dapat ditarik dari implikasi teoritis dari penelitian ini.